

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti
- Achmad Ali, 2010, "*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Adrian Sutedi, 2014, "*Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan berbagai Permasalahannya*", Jakarta: Sinar Grafika
- Agung Djojosoekarto, dkk, 2003, "*Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*", Jakarta: Sage Publications
- Amri Marzali, 2012, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Aziz Syamsuddi, 2011, "*Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*", Jakarta: Sinar Grafika
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020, "*Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*", Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Bagir Manan, 2004, "*Teori dan Politik Konstitusi*", Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 133.
- Bahder Johan Nasution, 2008, "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung: Penerbit Maju
- Bernard L Tanya dkk, 2013, "*Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*", Yogyakarta: Genta Publising
- Christian Evert Tutoroong, dkk, 2021, "*Potret Pengadaan Barang/Jasa Di Wilayah Papua Dan Papua Barat*", Jakarta: Indonesia Corruption Watch
- D.Y. Witanto, 2012, "*Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual, Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak Dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah*", Bandung: Mandar Maju
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, "*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*", Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Erwan Agus Purwanto, dkk, 2008, "*E-procurement Di Indonesia: Pengembangan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik*", Jakarta: Kemitraan Partnership

- Hans Kelsen, 2011, "*General Theory of Law and State*" Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media
- Hardi Afriansyah, 2021, "*Modul Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*", Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan PBJ LKPP
- Hotma P. Sibuea, 2010, "*Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*", Jakarta: Penerbit Erlangga
- I Gde Pantja Astawa, dkk, 2012, "*Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*", Bandung: Alumni
- Irwansyah, 2023, "*Penelitian Hukum, Pilihan Metode, & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*", Yogyakarta: Mirra Buana Media
- J. Supranto, 2003, "*Metode Penelitian Hukum dan Statistik*", Jakarta: PT Rineka Cipta
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, "*Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*", Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Jimly Asshiddique, 2010, "*Perihal Undang-Undang*", Jakarta: Rajawali Pers
- _____, 2010, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika
- Johny Ibrahim, 2016, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Jawa Timur: Bayu Media Publishing
- L. Rasjidi, dkk, 1993, "*Hukum Sebagai Suatu Sistem*", Bandung: Rosdakarya
- M. Solly Lubis, 1994, "*Filsafat dan Ilmu Penelitian*", Bandung: Mandar Maju
- Maria Farida Indrati, 2007, "*Ilmu Perundang Undang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*", Yogyakarta: Kanisius
- Michael Rosenfeld, 1991, "*Affirmative Action and Justice: A Philosophical and Constitutional Inquiry*", New Haven: Yale University Press
- Ni'matul Huda, 2014, "*Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*", Bandung: Nusa Media
- _____, 2021, "*Problematika Otonomi Khusus di Papua*", Bandung: Nusamedia
- Noor M. Aziz, dkk, 2010, "*Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang Undangan Di Luar Hierarki Berdasarkan UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*", Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM

- Notohamidjojo, 1975, *“Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum”*, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Nurus Zaman, 2020, *“Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum”*, Malang: Literasi Nusantara
- Putera Astomo, 2018, *“Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia”*, Depok: Rajawali Pers
- Ridwan H.R, 2018, *“Hukum Administrasi Negara”*, Jakarta: Rajawali Pers
- Salim H.S., dkk, 2014, *“Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis”*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- S.F Marbun, 1997, *“Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia”*, Yogyakarta: Liberty
- Sahya Anggara, 2018, *“Hukum Administrasi Negara”*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Satjipto Rahardjo, 2012, *“Ilmu Hukum”*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sidharta, 2006, *“Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan”*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 2008, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta: UI Press
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *“Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum”*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____, 2007, *“Mengenal Hukum Suatu Pengantar”*, Yogyakarta: Liberty
- _____, 2019, *“Teori Hukum”*, Yogyakarta: Maha Karya Pusaka
- Sunggono Bambang, 1994, *“Hukum dan Kebijakan Publik”*, Jakarta: Sinar Grafika
- Viktor M. Situmorang, 1998, *“Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkup Aparatur Pemerintah”*. Jakarta: Rineka Cipta
- W. Gulo, 2002, *“Metodologi Penelitian”*, Jakarta: Grasindo
- Willem Siahaya, 2012, *“Manajemen Pengadaan Procurement Management”*, Bandung: Alfabeta
- Y. Sogar Simamora, 2013, *“Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia”*, Surabaya: Laksbang Justitia, hlm. 1 dikutip dari Hugh Collins, 1999, *“Regulating Contracts”*, London: Oxford University Press

Yudhi Setiawan, dkk 2017, "*Hukum Administrasi Pemerintahan, Teori dan Praktik*", Depok: Rajawali Pers

Yuslim, 2015, "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*", Jakarta: Sinar Grafika

Zainuddin Ali, 2009, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika

B. JURNAL/DISERTASI/TESIS/MAKALAH/KARYA TULIS

Abby Gina, dkk, 2019, "Dibutuhkan Pemaknaan Baru Representasi Perempuan", *Jurnal Perempuan*, Vol.24 No.2

Arie Januar, 2019, "Peluang dan Tantangan Orang Asli Papua Menghadapi Perkembangan Industri Di Kabupaten Teluk Bintuni", *Jurnal Patanjala*, Vol II No. 3 September 2019

Bambang Sunaryo, dkk, 2014, "Nilai Penting Konsep Affirmative Action Policy Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Berbasis Merit", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Vol. 8 No. 1

Cosmas Sakti Wijaya Adi, 2017, "Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) Kementerian Keuangan Papua Barat", *Jurnal Indonesian Treasury Review Vol.2 No.2*

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka

Elizabeth S. Anderson, 2002, "Integration, Affirmative Action, and Strict Scrutiny", *New York University Law Review*, Vol. 77 No.5

Ferry Irawan Febriansyah, 2016, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Perspektif*, Vol. 21 No. 3

Henry Warsilah, 2015, "Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal Di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah", *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, Vol. 17 No. 2

Jonathan Jacob Paul Latupeirissa, dkk, 2021, "Problematika Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Kepada Daerah Papua Dan Papua Barat Dengan Perspektif Kebijakan Publik", *Sawala Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 9 No. 2

Kodar Udoyono, 2012, "*E-procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta*", *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 3 No.1

- Maria Farida Indrati, 2002, “Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Republik Indonesia”, Jakarta: Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Masnur Marzuki, 2009, “Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi,” *Jurnal Konstitusi PSHK-FH Universitas Islam Indonesia*, Vol.II No. 1
- Mohammad A. Musa’ad, 2011, “Kontekstualisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua: Perspektif Struktur dan Kewenangan Pemerintahan”, *Jurnal Kajian*, Vol. 16 No. 2
- Ni’matul Huda, 2006, “Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1
- Nina Jayanti, 2020, “Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Konstruksi Politik Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 4 No. 2
- Nurul Alifia Risky & Nida Handayani, 2023, “Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa Di PT. Pertamina Retail”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 1
- Otong Rosadi, 2010, “Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3
- Purnomo Edi Mulyono, 2017, “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik”, *Airlangga Development Journal*, Vol. 1 No. 1
- R. Tony Prayogo, 2016, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 2
- Retno Saraswati, 2013, “Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 3
- Richard Chauvel dalam Azmi Muttaqin, 2014, “Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua”, *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 4 No. 1
- Riski, 2020, “Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah,” *Jurnal Akta Yudisia*, Vol. 5 No. 2
- Rodliyah, dkk, 2019, “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 4 No. 2

- Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012, "Otonomi Khusus dalam Bingkai NKRI," *Jurnal Media Aspirasi Konstitusi*, Vol. 3, 1, No. 3
- Shinta Agustina, 2015, "Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44 No. 4
- Sri Nur Hari Susanto, 2019, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2
- Wicipto Setiadi, 2009, "Sanksi administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.6 No. 4
- Widhiana Hestining Putri, 2013, "Kontekstualitas Affirmative Action dalam Kebijakan Pertanahan di Yogyakarta", *Jurnal Bhumi*, Nomor 37 Tahun 12
- Yunita Sangkek, dkk, 2017, "Pengaruh Otonomi Khusus Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kota Sorong", *Jurnal Gradual*, Vol. 6 No. 2

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota

Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Papua Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Provinsi Papua

D. ARTIKEL INTERNET/WEBSITE/BERITA

Imam Hidayat, 2018, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah”, <http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf>, dikunjungi Pada Tanggal 20 Februari 2024 Jam 22.00 WIB

Juan Izako Renjaan De Araujo, 2020, “Tanah Kami, Mama Kami, Perspektif Teologis Tentang Sumber Kehidupan Orang Papua”, <https://arsip.jubi.id/tanah-kami-mama-kami-perspektif-teologis-tentang-sumber-kehidupan-orang-papua/>, dikunjungi Pada Tanggal 20 Juli 2024 Pukul 20.00 WIB

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian PUPR, 2023, <https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/79251064/pengumumanlelang>, dikunjungi Pada Tanggal 16 Maret 2024 Jam 16.10 WIB

Pemerintah Provinsi Papua, 2023, <https://sikap-oap.papua.go.id/perusahaan>, dikunjungi Pada Tanggal 16 Maret 2024 Jam 16.00 WIB

Robert Fullinwider, 2018, “Affirmative Action”, <https://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/>, dikunjungi Pada Tanggal 27 Januari 2024 Jam 19.00 WIB